

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang telah diajukan serta mengacu pada pembahasan atas temuan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, beberapa hal di bawah ini dapat dikemukakan sebagai kesimpulan.

1. Pajak Daerah merupakan satu-satunya penerimaan pendapatan daerah yang memiliki pengaruh positif terhadap semua jenis belanja, baik Belanja Barang/Jasa dan Modal maupun Belanja Pegawai. Semakin besar Pajak Daerah maka semakin besar pula Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa dan Modal yang akan dikeluarkan. Berbeda dengan Pajak Daerah, penerimaan dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berpengaruh negatif terhadap Belanja Pegawai tetapi tidak berpengaruh terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal. Penelitian ini menemukan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal. Ini pertanda bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi lebih cenderung menggunakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat untuk membiayai Belanja Barang/Jasa dan Modal. Variabel penerimaan pendapatan daerah berikutnya adalah Dana Alokasi Umum. Jenis penerimaan daerah ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jenis belanja Barang/Jasa dan Modal.
2. Dari empat variabel penerimaan daerah, hanya satu yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu Dana Alokasi Umum yang

berpengaruh secara positif. Semua kegiatan yang sumber keuangannya berasal dari Dana Alokasi Umum pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Pengeluaran belanja daerah yang berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah Belanja Pegawai. Sedangkan Belanja Barang/Jasa dan Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. Seluruh variabel penerimaan pendapatan daerah tidak memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja sebagai mediator. Temuan ini menggambarkan bahwa Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa dan Modal masih belum berkualitas seperti yang diharapkan, sehingga belum mampu menjadi variabel penghubung antara pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

6.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan hasil penelitian antara lain adalah :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengambil langkah strategis untuk melakukan intensifikasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dalam rangka untuk meningkatkan Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa dan Modal. Sesuai dengan hasil penelitian ini, sebagai penopang utama Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah memiliki peranan yang penting dalam mendukung alokasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Penerimaan Pajak Daerah yang tinggi akan memungkinkan Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk mengalokasikannya guna membiayai Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal yang lebih besar lagi.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah unsur Dana Perimbangan dari sektor Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat. Sebagaimana hasil penelitian ini, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal, hal ini dapat dilakukan secara intensif melalui langkah-langkah yang bersifat kerjasama, berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Pada dasarnya, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat adalah potensi riil yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengirimkan data dan informasi yang bernilai potensial fiskal, dimana data/informasi tersebut sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku pemungut Pajak Pusat, karena Pajak Penghasilan yang dibagihasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat Self Assessment, sehingga dibutuhkan informasi pembanding yang memadai bagi petugas Pajak Pusat (fiskus) untuk melakukan pemungutan dan pemeriksaan laporan pajak para wajib pajak.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Barang/Jasa dan Modal belum mampu memberi pengaruh positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga belum mampu menjadi mediator yang baik bagi pendapatan daerah dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Langkah yang perlu dilakukan adalah menyusun perencanaan strategis mengenai anggaran Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal melalui program dan kegiatan yang bersifat

produktif. Misalnya dengan lebih banyak mengalokasikan lebih banyak belanja daerah untuk peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif daerah sesuai kearifan lokal masing-masing daerah. Dengan demikian diharapkan akan ada pengembangan pusat-pusat kegiatan perekonomian masyarakat yang dapat meningkatkan iklim kewirausahaan, serta berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Sungguh disadari hal seperti ini adakalanya lebih bersifat politis dan tidak berorientasi jangka pendek, bahkan bisa melampaui masa jabatan Kepala Daerah, sehingga diperlukan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif pada saat penyusunan APBD Kabupaten/Kota.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota juga perlu melakukan langkah-langkah sinkronisasi pengalokasian belanja daerah dengan belanja Pemerintah Pusat (APBN) dan belanja Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi). Sebagaimana ketentuan pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara secara utuh, sehingga pengelolaan keuangan negara dan daerah harus direncanakan serta dilaksanakan secara selaras dan bersifat terpadu atau komprehensif. Dalam hal ini pengalokasian belanja pada APBD Kabupaten/Kota sebaiknya bersifat komplementer dengan belanja APBN dan APBD Provinsi terutama pada urusan pemerintahan yang bersifat konkrue baik yang bersifat wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) maupun yang bersifat pilihan (kelautan/perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, ESDM, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi). Hal ini selain untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih

pengalokasian belanja pemerintahan, juga untuk mengoptimalkan manfaat yang diperoleh masyarakat.

5. Selain bersinergi dengan tingkatan pemerintah yang lebih tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus bekerja sama dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota disekitarnya. Hal ini penting dilakukan agar pengembangan perekonomian regional dapat terwujud sesuai dengan peranan dan potensi masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di satu kawasan.
6. Untuk mengatasi keterbatasan dana APBD Kabupaten/Kota, khususnya dalam hal pengalokasian Belanja Barang/Jasa dan Modal yang bersifat produktif, Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat menghimpun dana non APBD untuk diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya fasilitas/ruang publik yang bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya dengan menghimpun dana CSR dari BUMN atau perusahaan swasta. Untuk dapat menghimpun dana non APBD tersebut, maka diperlukan kepercayaan publik (*public trust*) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya kepada sosok Bupati/Walikota, yang salah satunya dapat dilihat dari manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel pada APBD Kabupaten/Kota.
7. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlu merekonstruksi pembagian jenis belanja barang/jasa dan belanja modal pada APBD, dalam hal ini perlu dikaji adanya pemisahan antara belanja barang/jasa dan belanja modal yang bersifat operasional untuk memenuhi kebutuhan internal Pemerintah Daerah, dengan belanja barang/jasa dan belanja modal yang bersifat produktif untuk kepentingan eksternal atau masyarakat.

8. Terhadap penelitian selanjutnya, diharapkan dapat lebih mendalami temuan dari penelitian ini, terutama yang terkait dengan tidak adanya peranan yang signifikan dari DBH Pajak dari Provinsi terhadap belanja barang/jasa dan modal maupun terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Apakah tidak signifikannya peranan DBH Pajak dari Provinsi tersebut disebabkan oleh karakteristik unik dari pajak provinsi itu sendiri, atau karena faktor lain. Selain itu, penelitian ke depan juga dapat memperjelas mengapa DAU memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi (berpengaruh positif) dimana seharusnya memiliki pengaruh negatif. Seharusnya secara teoritis, semua jenis penerimaan daerah yang bersumber dari beban masyarakat memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.